The Politics of Railway: Implementasi Kebijakan Perkeretaapian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007
oleh Kementerian Perhubungan Periode 2007-2020
TAUFIK AL FARUK, Bayu Dardias Kurniadi, S.IP., M.A., M.Pub.Pol., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Daftar Isi

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Gambar iv
Daftar Tabel v
Daftar Akronim vi
Abstraksi viii
Abstract ix

Bab I 1
Pendahuluan 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 5
1.3 Tujuan 5
1.4 Manfaat 5
1.4.1 Manfaat Teoritis 5
1.5 *Literature Review* 6
1.6 Kerangka Teori 8
1.6.1 Konsep Kebijakan Publik 8
1.6.2 Implementasi Kebijakan Publik Menurut Marillee S. Grindle 11
1.6.3 Pendekatan Implementasi Kebijakan 15
1.6.4 Konsep *Public Service Obligation* 17
1.7 Definisi Konseptual 18
1.8 Definisi Operasional 18
1.9 Alur Pikir 19
1.10 Metode Penelitian 19
1.10.1 Jenis Penelitian 19
1.10.2 Teknik Pengumpulan Data 20
1.10.3 Teknik Analisis Data 21
1.11 Sistematika Penulisan 22
Bab II 24
Dinamika Kebijakan Perkeretaapian 24
2.1 Sejarah Singkat Perkeretaapian Indonesia 25
2.2 Jejak Penyelenggaraan Perkeretaapian 27

The Politics of Railway: Implementasi Kebijakan Perkeretaapian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007
oleh Kementerian Perhubungan Periode 2007-2020
Ampuni Tasik Kembaren, M.A., M.Pub.Pol., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

2.3 Alur Implementasi Kebijakan Perkeretaapian 34
2.4 *Policy Outcomes* 38
Bab III 42
Analisis Implementasi Kebijakan Perkeretaapian; *Policy Content* 42
3.1 Pelaksana kebijakan/ implementor kebijakan 42
3.2 Kepentingan aktor yang dipengaruhi oleh program yang akan di implementasikan 43
3.3 Kedudukan pengambil kebijakan 46
3.4 Derajat perubahan yang dikehendaki 48
3.5 Alokasi sumber daya 53
3.6 Jenis manfaat yang dikehendaki 55
Bab IV 57
Analisis Implementasi Kebijakan Perkeretaapian; *Policy Context* 57
4.1 Kekuatan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat 57
4.2 Kepatuhan dan responsivitas 62
4.3 Karakter rezim dan Lembaga 64
Bab V 71
Analisa Peran Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam Proses Implementasi Kebijakan Perkeretaapian Nasional 71
5.1 Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 71
5.2 Analisis Peran Direktorat Jenderal Perkeretaapian 74
5.2.1 Bureaucratic Politics 74
5.2.2 General Politics 76
Bab VI 79
Penutup 79
6.1 Kesimpulan 79
Daftar Pustaka 83

The Politics of Railway: Implementasi Kebijakan Perkeretaapian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007
oleh Kementerian Perhubungan Periode 2007-2020
TAUFIK AL FARUK, Bayu Dardias Kurniadi., S.IP., M.A., M.Pub.Pol., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Daftar Gambar

Gambar 1. 1 Implementasi sebagai Delivery Mechanism Policy Output menurut Purwanto dan Sulistyastuti (Dadlurrahman, 2014, p. 167) 12
Gambar 1.2 Proses Implementasi Kebijakan sebagai Proses Administratif dan Politis menurut Merille S. Grindle (Santoso, 2014, p. 128) 13
Gambar 1.3 Alur Pikir Implementasi Kebijakan Perkeretaapian 19
Gambar 2.1 Sejarah Perkeretaapian Indonesia (Direktorat Jenderal Perkeretaapian, 2021) ... 25
Gambar 2.2 Jejak Penyelenggaraan Perkeretaapian di Indonesia 27
Gambar 2.4 Peta Daerah Operasional Perkeretaapian di Pulau Sumatera (kereta-api.co.id, 2017) 31
Gambar 2 3 Peta Divisi Regional Perkeretaapian di Pulau jawa (kereta-api.co.id, 2017) 31
Gambar 2.5 Alur Implementasi Kebijakan Perkeretaapian sebagai Proses Delivery Mechanism 35
Gambar 2.6 Dampak Kebijakan yang dihasilkan dari Program yang di-delivery-kan 39
Gambar 3.1 Peta Kedudukan Pengambil Kebijakan Perkeretaapian (Sumber: diolah dari peta kedudukan pengambil kebijakan relokasi terminal semarang oleh Fryda Pangestika) 47
Gambar 3.2 Skema Umum Kelembagaan Perkeretaapian Tahun 2020-2024 (Direktorat Jenderal Perkeretaapian, 2020) 51
Gambar 3.3 Skema Perizinan BUP Prasarana Perkeretaapian Umum (Ditjen KA, 2021) 52
Gambar 3.4 Realisasi Anggaran Ditjen Perkeretaapian, Kemenhub Tahun 2015-2020 54
Gambar 4.1 Usulan Bagan Organisasi di Lingkungan DIrektorat Jenderal Perkeretaapian (Direktorat Jenderal Perkeretaapian, 2020, pp. III-60) 62
Gambar 6.1 Proses Implementasi Kebijakan Perkeretaapian Nasional (Sumber: diolah dari Bagan Implementasi Kebijakan Relokasi Terminal TerboyoSemarang oleh Fryda Pangestika) 82

The Politics of Railway: Implementasi Kebijakan Perkeretaapian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007
oleh Kementerian Perhubungan Periode 2007-2020
TAUFIK AL FARUK, Bayu Dardias Kurniadi, S.IP., M.A., M.Pub.Pol., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Kontras Pendekatan *Top-Down, Bottom-Up, dan Hybrid* 16
Tabel 2.1 Jaringan Jalur Kereta Api di Indonesia (Direktorat Jenderal Perkeretaapian, 2020, p. 5) 32
Tabel 2.2 Data Aset Milik Negara yang Dikelola oleh PT. KAI (Direktorat Jenderal Perkeretaapian, 2020) 32
Tabel 2.3 Data Aset Milik Negara Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang Dikelola oleh Ditjen KA (Direktorat Jenderal Perkeretaapian, 2019, pp. 4(1)-4(3)) 32
Tabel 2.4 Unit Pelaksana Teknis Perkeretaapian di Indonesia yang Dikelola oleh Ditjen KA (Kementerian Perhubungan, 2014) 33
Tabel 4.1 Penambahan Jadwal Perjalanan Kereta pada GAPEKA 2021 (Ditjen Perkeretaapian, 2021) 63